

Katalog BPS: 9302002.71

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

MENURUT PENGELUARAN PROVINSI SULAWESI UTARA

2011 – 2015



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI UTARA**

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

PROVINSI SULAWESI UTARA

MENURUT PENGELUARAN

2011 - 2015

<http://bitungkota.bps.go.id>

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI SULAWESI UTARA MENURUT PENGELUARAN 2011 - 2015

ISBN : 978-602-1003-61-9

Nomor Publikasi : 71550.1507

Katalog BPS : 9302002.71

Ukuran Buku : 21 x 29,7 cm

Jumlah Halaman : viii + 80 halaman

Naskah:

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

BPS Provinsi Sulawesi Utara

Gambar Kulit:

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

BPS Provinsi Sulawesi Utara

Diterbitkan Oleh:

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

Menurut teori ekonomi makro, penghitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu: pendekatan produksi/penyediaan (PDRB menurut Lapangan Usaha/*industry*), pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDRB menurut Pengeluaran / *expenditure*) serta pendekatan pendapatan (PDRB menurut pendapatan/*income*). Ketiga pendekatan penghitungan tersebut secara teori akan menghasilkan angka PDRB yang sama.

Publikasi ini merupakan publikasi lanjutan dari Publikasi PDRB Tahun Dasar Baru (2010=100), dan sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*. Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir yang dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Luar Negeri, Impor Luar Negeri, serta Ekspor Neto Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah).

Kepada seluruh anggota Tim Penyusun Publikasi ini yang telah memberikan kontribusinya dalam mewujudkan publikasi ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian pula kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Terakhir, disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya.

Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Manado, 1 April 2016

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI UTARA,

Moh. Edi Mahmud

- Halaman ini sengaja dikosongkan-

<http://bitungkota.bps.go.id>

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB 1. Pendahuluan	1
1.1 Pengertian Produk Domestik Bruto (PDRB)	3
1.2 Kegunaan Statistik PDRB	5
Bab 2. Metode Estimasi dan Sumber Data	7
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga	9
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT	12
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah	14
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	16
2.5 Perubahan Inventori	20
2.6 Ekspor-Import	23
Bab 3. Tinjauan Ekonomi Menurut PDRB Pengeluaran Sulawesi Utara	25
3.1 Tinjauan Agregat PDRB Pengeluaran Sulawesi Utara	27
3.2 Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga	31
3.3 Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT	34
3.4 Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah	35
3.5 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto	37
3.6 Perkembangan Perubahan Inventori	39
3.7 Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri	40
3.8 Perkembangan Import Barang dan Jasa Luar Negeri	41
3.9 Perkembangan Net Ekspor Antar Daerah	42

BAB 4. Perkembangan Agregat PDRB Menurut Pengeluaran Sulawesi Utara	45
4.1 PDRB Nominal	47
4.2 Perbandingan PDRB Pengeluaran Untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap Ekspor	48
4.3 Perbandingan PDRB Pengeluaran Untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap PMTB	48
4.4 Proporsi Konsumsi Akhir Terhadap PDRB	49
4.5 Perbandingan Ekspor Terhadap PDRB	50
4.6 Perbandingan PDRB Terhadap Impor	50
4.7 Keseimbangan Total Penyediaan dan Total Permintaan	51
4.8 Neraca Perdagangan (<i>Trade Balance</i>)	52
4.9 Rasio Perdagangan Internasional (RPI)	53
4.10 <i>Incremental Capital Output Ratio</i> (ICOR)	53
LAMPIRAN	55

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah), 2011 - 2015	27
Tabel 2.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah), 2011 - 2015	28
Tabel 3.	Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran (Persentase), 2011 - 2015	29
Tabel 4.	Pertumbuhan Ekonomi PDRB Menurut Pengeluaran (Persentase), 2011 – 2015	29
Tabel 5.	Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran, 2011 - 2015	30
Tabel 6.	Inflasi PDRB Menurut Pengeluaran, 2011 - 2015	30
Tabel 7.	Perkembangan Komponen Konsumsi Akhir Rumah Tangga 2011 – 2015	31
Tabel 8.	Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga 2011 - 2015	32
Tabel 9.	Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga 2011 – 2015	33
Tabel 10.	Pertumbuhan Inflasi PDRB Komponen Konsumsi Akhir Rumah Tangga, 2011 – 2015	33
Tabel 11.	Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT 2011 – 2015	34
Tabel 12.	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah 2011 – 2015	35
Tabel 13.	Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah 2011 – 2015	37
Tabel 14.	Perkembangan dan Struktur PMTB 2011 – 2015	38
Tabel 15.	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori 2011 - 2015	39
Tabel 16.	Perkembangan Ekspor Luar Negeri Barang dan Jasa 2011 – 2015	40
Tabel 17.	Perkembangan Impor Luar Negeri Barang dan Jasa 2011 - 2015	42
Tabel 18.	Perkembangan Net Ekspor Antar Daerah 2011 - 2015	43
Tabel 19.	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per kapita 2011 – 2015	47
Tabel 20.	Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor, 2011 - 2015	48
Tabel 21.	Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB (ADHB) 2011 - 2015	49
Tabel 22.	Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB 2011 – 2015	49
Tabel 23.	Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB), 2011 – 2015	50
Tabel 24.	Rasio PDRB terhadap Impor, 2011 – 2015	50
Tabel 25.	Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan 2011 - 2015	51
Tabel 26.	Neraca Perdagangan Barang dan Jasa, 2011 - 2015	52
Tabel 27.	Rasio Perdagangan Internasional Sulawesi Utara, 2011- 2015	53
Tabel 28.	<i>Incremental Capital Output Ratio</i> , Sulawesi Utara, 2011 – 2015	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Perbandingan PDRB *adh Berlaku* dan *adh Konstan* 2010 Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah), 2011 - 2015 28

<http://bitungkota.bps.go.id>



<http://bitungkota.bps.go.id>

Bab I

Pendahuluan

- Halaman ini sengaja dikosongkan-

<http://bitungkota.bps.go.id>

1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 dan ini tentu akan mencerminkan struktur ekonomi terkini.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB yaitu:

a. Menurut Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu:

1. Pertanian Kehutanan dan Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Pengadaan Listrik dan Gas
5. Pengadaan Air Pengolahan Sampah Limbah dan Daur Ulang
6. Konstruksi
7. Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
8. Transportasi dan Pergudangan
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
10. Informasi dan Komunikasi
11. Jasa Keuangan dan Asuransi
12. Real Estat
13. Jasa Perusahaan
14. Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
15. Jasa Pendidikan
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

17. Jasa lainnya.

Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

b. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji sewa tanah bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

c. Menurut Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari:

1. Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga
2. Pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga
3. Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah
4. Pembentukan modal tetap domestik bruto
5. Perubahan inventori dan
6. Ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

1.2 KEGUNAAN STATISTIK PDRB

Data PDRB adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian suatu wilayah/*region* setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu *region*. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar begitu juga sebaliknya.

PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.

Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu *region*. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu *region*.

PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi akhir investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri.

Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.

PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir investasi dan perdagangan luar negeri.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

- Halaman ini sengaja dikosongkan-

<http://bitungkota.bps.go.id>



<http://bitungakotabps.go.id>

Bab II

Metode Estimasi

dan Sumber Data

- Halaman ini sengaja dikosongkan-

<http://bitungkota.bps.go.id>

i. Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

ii. Konsep dan definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan dapat memiliki harta dan kewajiban serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PK-RT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (*United Nations*) sbb:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol;
2. Minuman beralkohol tembakau dan narkotik;
3. Pakaian dan alas kaki;
4. Perumahan air listrik gas dan bahan bakar lainnya;
5. Furnitur perlengkapan rumah tangga dan pemeliharaan rutin;
6. Kesehatan;
7. Angkutan;
8. Komunikasi;
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan;
10. Pendidikan;
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel;
12. Barang dan jasa lainnya.

Namun karena keterbatasan data maka 12 COICOP tersebut dikelompokkan kembali menjadi hanya 7 (tujuh) COICOP yaitu:

1. Makanan Minuman dan Rokok;
2. Pakaian dan Alas Kaki;
3. Perumahan Perkakas Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga;
4. Kesehatan dan Pendidikan;
5. Transportasi Komunikasi Rekreasi dan Budaya;
6. Hotel dan Restoran;
7. Lainnya;

Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sbb:

- Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);

Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).

- Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
- Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen di luar wilayah atau di luar negeri (diperlakukan sebagai impor).

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PK-RT yaitu:

- Pembelian langsung oleh non-residen diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut).
- Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi) seperti barang antik lukisan dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga bukan konsumsi rumah tangga.
- Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha perbaikan besar rumah dan pembelian rumah.
- Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

iv. Penghitungan PKRT Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PK-RT adalah :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS dalam bentuk pengeluaran konsumsi per-kapita seminggu untuk makanan dan pengeluaran per-kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan
- Jumlah penduduk pertengahan tahun
- Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS) dalam bentuk data atau indikator *supply* komoditas dari jenis pengeluaran tertentu
- Indeks Harga Konsumen (IHK).

2. Metode penghitungan

Penghitungan PK-RT didasarkan pada hasil Susenas. Untuk menghasilkan penghitungan PK-RT yang mencerminkan kondisi sesungguhnya diperlukan adanya beberapa penyesuaian (*adjustment*). Penyesuaian dilakukan dengan menggunakan data pendukung (data sekunder) dalam bentuk indikator suplai (di luar Susenas) dari beberapa komoditi tertentu. Hasil penghitungan dari data sekunder tersebut dianggap lebih mencerminkan PK-RT yang sebenarnya. Penyesuaian (*adjustment*) yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan data indikator suplai untuk beberapa komoditas. Penggantian dilakukan pada level komoditas kelompok komoditas atau jenis pengeluaran tertentu.

Langkah penghitungan di atas menghasilkan besarnya PKRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PKRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 diperoleh dengan cara men-*deflate* PKRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

Untuk lebih jelasnya langkah-langkah penghitungan PK-RT dapat diringkas sbb:

1. Estimasi PKRT hasil Susenas:
 - a) Makanan = pengeluaran konsumsi per kapita seminggu x (30/7) x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun
 - b) Bukan makanan = pengeluaran konsumsi per kapita sebulan x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun
2. Terhadap data poin ke-1 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas untuk jenis pengeluaran tertentu;
3. Data poin ke-2 dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) kelompok COICOP;
4. Diperoleh nilai PK-RT tahun 2010 yang telah di-*adjust*;
5. Susun Indeks Implisit berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat) dan 7 kelompok COICOP;
6. PK-RT adh konstan 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin ke-4 dengan hasil poin ke-5.

i. Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumahtangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tidak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii. Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

Karakteristik unit LNP adalah sbb :

- LNP umumnya adalah lembaga formal tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi dan tidak berhak menguasai *profit* atau surplus karena *profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- kebijaksanaan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
- istilah *non profit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumahtangga serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 (tujuh) jenis lembaga yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT sama dengan nilai output non pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

a. Konsumsi antara;

Contoh : pembelian alat tulis barang cetakan pembayaran listrik air telepon teleks faksimili biaya rapat seminar perjamuan transportasi bahan bakar perjalanan dinas belanja barang dan jasa lain sewa gedung sewa perlengkapan kantor dll.

b. Kompensasi tenaga kerja;

Contoh : upah gaji lembur honor bonus dan tunjangan lainnya

c. Penyusutan;

d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi) contoh: PBB STNK BBN dll.

iv. Penghitungan PK-LNPRT Tahunan

1. Sumber data

- Hasil Survei Khusus Lembaga Non-profit (SK-LNP).
- Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
- Hasil *up-dating* direktori LNPRT.
- Informasi yang diperoleh dari hasil *up-dating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.
- Indeks Harga Konsumen (IHK)

2. Metode penghitungan

PK-LNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung yaitu menggunakan hasil SKLNP. Tahapan estimasi PK-LNPRT adalah sbb :

Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenisnya dihitung dengan rumus sbb :

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

\bar{x}_{ij} : Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

x_{ij} : PK-LNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

i : Jenis lembaga LNPRT $i = 1 \ 2 \ 3 \ \dots \ 7$

j : Jenis pengeluaran LNPRT $j = 1 \ 2 \ 3 \ \dots \ 19$

Mengestimasi PK-LNPRT dengan menggunakan rumusan sbb:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} x_{ij} \times N_i$$

X : PK-LNPRT adh Berlaku

N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PK-LNPRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PK-LNPRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 diperoleh dengan cara *men-deflate* PK-LNPRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

i. Pendahuluan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir sedangkan sebagai produsen pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang dan jasa maupun aktivitas investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PK-P mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin pembayaran upah dan gaji pegawai transfer sosial dalam bentuk barang perkiraan penyusutan barang modal dan nilai output dari Bank Indonesia dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum mencakup kegiatan sbb:

1. memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh aktivitas pencetakan publikasi kartu pos reproduksi karya seni pembibitan tanaman di kebun percobaan dsb. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah.
2. memproduksi jasa. Contoh aktivitas penyelenggaraan rumah sakit sekolah perguruan tinggi museum perpustakaan tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non komoditi (pendapatan jasa).

iii. Cakupan

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi Kabupaten/Kota maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) Provinsi mencakup :

- a. PK-Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah provinsi;
- b. PK-Pemerintah Provinsi yang bersangkutan;
- c. PK-Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari Pemerintah Provinsi;
- d. PK-Pemerintah Desa/Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah provinsi bersangkutan.

iv. Penghitungan PDRB Tahunan

1. Sumber Data

- Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P Provinsi Tahunan adalah:
- Data realisasi APBN Tahunan (Kemenkeu)
- Data realisasi APBD Tahunan (Kemenkeu)
- Statistik Keuangan Daerah (BPS)
- Output Bank Indonesia (BI)
- Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementerian Keuangan serta Indeks Harga dari BPS.

2. Metode Penghitungan

a. PK-P Provinsi adh Berlaku

Secara umum PK-P adh Berlaku dihitung menggunakan rumusan berikut :

$$\text{PK-P adh Berlaku} = \text{Output non pasar} - \text{penjualan barang dan jasa} + \text{output Bank Indonesia}$$

Output non pasar dihitung dengan pendekatan biaya yg dikeluarkan yaitu: Belanja pengadaan barang/jasa bantuan sosial dalam bentuk barang (yg dibeli dengan harga pasar) belanja pegawai dan penyusutan.

Untuk level provinsi PK-P provinsi adh Berlaku dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah Provinsi itu sendiri + pengeluaran akhir konsumsi pemerintah seluruh pemerintahan kabupaten/kota yang ada di wilayah provinsi tersebut + pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah provinsi tersebut + pengeluaran pemerintah pusat yang menjadi bagian dari provinsi yang bersangkutan.

b. PK-P Provinsi adh Konstan

Pengeluaran konsumsi pemerintah adh Konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor Indeks Upah Indeks Implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

i. Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi disini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain mesin dan perlengkapan kendaraan tumbuhan ternak dan barang modal lainnya.

ii. Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan pembuatan pembelian sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar transfer atau barter barang modal) dan pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidayakan sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan transfer atau barter dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

iii. Cakupan

PMTB terdiri dari :

- Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas seperti bangunan tempat tinggal bangunan bukan tempat tinggal bangunan lainnya mesin dan perlengkapan alat transportasi aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*) produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*) dan sebagainya;
- Biaya alih kepemilikan aset non finansial yang tidak diproduksi seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
- Perbaikan besar aset yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya (seperti *overhaul* mesin produksi reklamasi pantai pembukaan pengeringan dan pengairan hutan serta pencegahan banjir dan erosi).

iv. Penghitungan PMTB Tahunan

1. Sumber data

- Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Prov/Kab/Kota;
- Nilai impor 2 digit HS yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat;
- Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil dan Rumah tangga (level provinsi);
- Laporan keuangan perusahaan;
- Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang Level Provinsi;
- IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar;
- Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas);
- Publikasi Statistik Listrik Gas dan Air Minum;
- Publikasi Statistik Konstruksi;
- Data Eksplorasi Mineral dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM);
- Statistik Peternakan Ditjen Peternakan.

2. Metode penghitungan

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan “langsung” adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung sedangkan pendekatan “tidak langsung” adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri atau disebut sebagai pendekatan “ arus komoditas”. Dalam hal ini penyediaan atau “*supply*” dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga (adh) pembelian di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan seperti biaya transportasi biaya instalasi pajak-pajak serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai adh berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB adh Konstan maka PMTB adh Berlaku tersebut di “*deflate*” (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*) yang kemudian sebagian di antaranya dialokasikan menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi baik adh Berlaku maupun adh Konstan.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik dapat diperoleh dengan 2 (dua) cara:

Pertama dengan mengalokasikan output mesin alat angkutan dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan sehingga diperoleh PMTB adh Berlaku. Untuk memperoleh nilai adh Konstan adalah dengan men-*deflate* PMTB (adh Berlaku) dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Kedua yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara “ekstrapolasi” atau mengalikan PMTB adh Konstan dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB

diawali dengan menghitung PMTB adh Konstan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB adh Berlaku nilai PMTB adh Konstan tersebut di-*inflate* (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB adh Konstan di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara: *Pertama* PMTB adh Berlaku diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rician tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). *Kedua* untuk memperoleh PMTB adh Konstan adalah dengan cara men-*deflate* PMTB adh Berlaku dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB adh Berlaku untuk barang modal tak-berwujud seperti eksplorasi mineral dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel pertumbuhan adh Berlaku dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Untuk PMTB adh Konstan diperoleh dengan men-*deflate* nilai adh Berlaku dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunannya.

Untuk perangkat lunak PMTB adh Berlaku diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang *software*. Untuk adh Konstan diperoleh dengan men-*deflate* nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan sastra dan seni original (*entertainment literary or artistic original products*) data dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat sedangkan data impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB adh Konstan-nya diperoleh dengan cara men-*deflate* nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tidak langsung (arus komoditas) yaitu:

- a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.
- b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh.
- c. Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu terlalu lama.

i. Pendahuluan

Dalam aktivitas ekonomi inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi di samping tenaga kerja dan barang modal.

Dalam PDB/PDRB komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi barang setengah jadi serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii. Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*) serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori yang dapat bermakna pertambahan (tanda positif) atau pengurangan (tanda negatif).

Bagi produsen keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar sedangkan bagi pemerintah kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik) maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras terigu minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

iii. Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sbb :

- a. Inventori menurut industri seperti produk atau hasil perkebunan kehutanan perikanan pertambangan industri pengolahan gas kota air bersih serta konstruksi;
- b. Berbagai jenis bahan baku dan penolong (*material dan supplies*) yaitu semua bahan komponen atau persedi-

- aan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
 - d. Barang setengah jadi yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
 - e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
 - f. Ternak untuk tujuan dipotong;
 - g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
 - h. Persediaan pada pemerintah yang mencakup barang strategis seperti beras kedelai gula pasir dan gandum.

iv. Penghitungan Perubahan Inventori Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah :

- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait dari survei atau dari mengunduh *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
- Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD;
- Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalian;
- Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang;
- Data komoditas perkebunan;
- Indeks harga implisit PDRB industri terpilih dan
- Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.
- Data eksternal lain seperti data persediaan beras dari Bulog data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI) gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI) dan ternak dari Ditjennak Kementan.

2. Metode Penghitungan

Terdapat 2 (dua) metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi “korporasi” sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi “komoditas”.

Di lihat dari sisi manfaatnya pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori adh berlaku diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan adalah sbb :

- menghitung posisi inventori adh Konstan dengan cara men-*deflate* stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- menghitung perubahan inventori adh Konstan dengan mengurangkan posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- menghitung perubahan inventori adh Berlaku dengan meng-*inflate* perubahan inventori adh Konstan dengan IHPB rata-rata tahunan.

Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori adh Berlaku diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian atau harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia.

Perubahan barang inventori adh Konstan dihitung dengan:

- a. men-*deflate* nilai perubahan inventori adh Berlaku dengan indeks harga yang sesuai
- b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen perubahan inventori adalah bahwa :

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harganya;
- Data perubahan inventori tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- Diperlukan *adjustment* dengan cara me-*mark-up* guna untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia.

i. Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

ii. Konsep dan definisi

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian barter hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non residen yang berada di luar wilayah tersebut.

iii. Cakupan

Ekspor-Impor pada suatu wilayah terdiri dari:

- a. Ekspor/impor barang dari/ke luar negeri ke/dari provinsi tersebut
- b. Ekspor/impor jasa dari/ke luar negeri ke/dari provinsi tersebut

Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan asuransi komunikasi pariwisata dan jasa lainnya

- c. Net Ekspor antar daerah

Ekspor antar daerah

Impor antar daerah

iv. Penghitungan Ekspor-Impor Tahunan

1. Sumber data

- a. Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$);
- b. Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$);
- c. Neraca Pembayaran Indonesia dari BI;

- d. Laporan Simopel yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan;
- e. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi di jembatan timbang;
- f. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi dari hasil survei;
- g. Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia.

2. Metode Penghitungan

Ekspor-Import barang luar negeri dinilai menurut harga *free on board* (fob) dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang sedangkan impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Di samping itu nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented transaction*) baik oleh residen maupun non residen sedangkan net ekspor antar wilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran.



Bab III
Tinjauan Ekonomi
Menurut PDRB Pengeluaran
Sulawesi Utara

- Halaman ini sengaja dikosongkan-

<http://bitungkota.bps.go.id>

3.1 TINJAUAN AGREGAT PDRB PENGELUARAN SULAWESI UTARA

Perubahan struktur ekonomi Provinsi Sulawesi Utara akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode tahun 2011-2015 tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional.

Data yang ada menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Sulawesi Utara digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (rumah tangga LNPRT dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori).

Kondisi perekonomian Sulawesi Utara menunjukkan peningkatan dilihat dari nilai PDRB yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukkan arah positif. Peningkatan ekonomi tersebut digambarkan melalui nilai PDRB ADHB dan ADHK serta pertumbuhan pada total PDRB.

Tabel 1
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah), 2011 - 2015

Komponen Pengeluaran	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	28 031 772	30 908 682	32 781 304	36 486 276	41 806 112
2. Konsumsi LNPRT	1 257 570	1 419 416	1 488 735	1 671 668	1 792 357
3. Konsumsi Pemerintah	10 077 731	11 110 270	12 349 805	14 016 073	16 249 834
4. PMTB	23 052 595	23 053 649	24 452 333	26 102 489	30 379 594
5. Perubahan Inventori	62 030	134 992	56 092	56 079	19 934
6. Ekspor Luar Negeri	9 405 521	12 426 790	10 481 910	15 630 020	13 287 201
7. Impor Luar Negeri	2 268 464	2 270 146	2 588 037	3 010 524	2 805 652
8. Net Ekspor Antar Daerah	(12 275 155)	(12 908 348)	(7 924 681)	(10 341 504)	(9 454 117)
Total PDRB	57 343 601	63 875 307	71 097 461	80 610 577	91 275 262

Nilai PDRB Sulawesi Utara (adh Berlaku) selama periode tahun 2011-2015 menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume.

Selain dinilai atas dasar harga (adh) Berlaku PDRB menurut pengeluaran juga dinilai adh Konstan 2010 atau adh berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan adh konstan PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas (tanpa ada pengaruh perubahan harga).

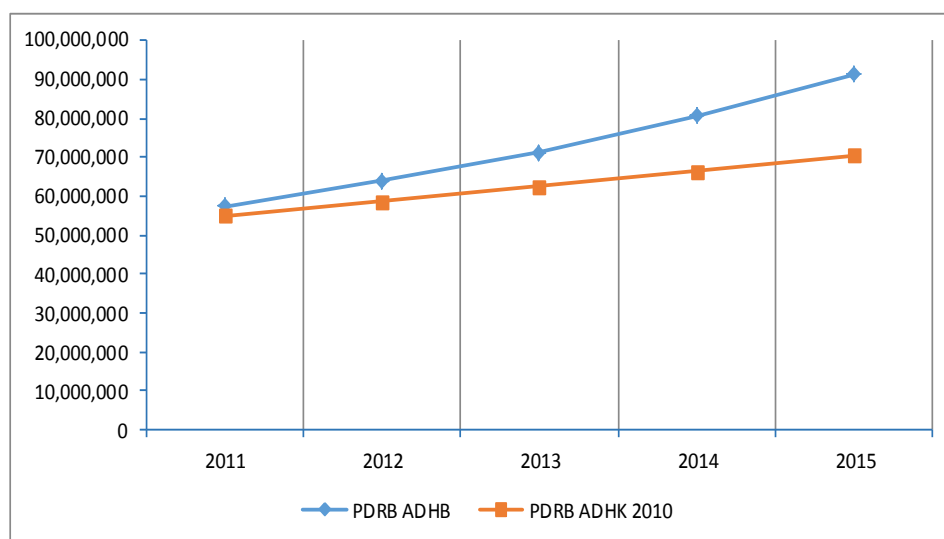
PDRB komponen pengeluaran adh Konstan menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Selama kurun waktu 2011–2015 gambaran tentang perkembangan ekonomi Sulawesi Utara berdasarkan PDRB adh Konstan dapat dilihat pada tabel 2. Sama halnya dengan PDRB adh Berlaku seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB adh Konstan juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Tabel 2
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah), 2011 - 2015

Komponen Pengeluaran	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	26 684 858	28 253 938	29 929 893	31 638 844	33 676 774
2. Konsumsi LNPRT	1 223 509	1 332 377	1 369 767	1 427 683	1 431 274
3. Konsumsi Pemerintah	9 288 863	9 940 603	10 641 852	11 537 630	12 684 033
4. PMTB	21 961 154	22 369 519	23 331 262	23 831 172	25 995 779
5. Perubahan Inventori	57 278	124 540	48 170	48 033	17 638
6. Ekspor Luar Negeri	9 276 346	11 819 964	9 291 650	12 396 746	10 945 881
7. Impor Luar Negeri	2 294 750	2 142 340	2 222 315	2 382 598	2 361 562
8. Net Ekspor Antar Daerah	(11 286 360)	(13 021 014)	(9 967 780)	(12 138 088)	(11 971 006)
Total PDRB	54 910 897	58 677 587	62 422 498	66 359 422	70 418 811

Dari grafik 1 terlihat bahwa pada umumnya nilai PDRB adh Berlaku selalu lebih besar dari nilai PDRB adh Konstan. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB adh Berlaku sedangkan dalam PDRB adh Konstan pengaruh faktor harga telah ditiadakan.

Gambar 1
Perbandingan PDRB adh Berlaku dan adh Konstan 2010
Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah), 2011 - 2015



Terbentuknya keseluruhan PDRB atau total PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannya terdiri dari pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), pengeluaran konsumsi akhir LNPRT (PK-LNPRT), pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), ekspor (X) dan impor (M).

Tabel 3
Distribusi PDRB ADHB
Menurut Pengeluaran (Persentase), 2011 - 2015

Komponen Pengeluaran	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	48.88	48.39	46.11	45.26	45.80
2. Konsumsi LNPRT	2.19	2.22	2.09	2.07	1.96
3. Konsumsi Pemerintah	17.57	17.39	17.37	17.39	17.80
4. PMTB	40.20	36.09	34.39	32.38	33.28
5. Perubahan Inventori	0.11	0.21	0.08	0.07	0.02
6. Ekspor Luar Negeri	16.40	19.45	14.74	19.39	14.56
7. Impor Luar Negeri	3.96	3.55	3.64	3.73	3.07
8. Net Ekspor Antar Daerah	(21.41)	(20.21)	(11.15)	(12.83)	(10.36)
Total PDRB	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Berdasarkan tabel 3, terlihat bahwa selama periode tahun 2011-2015, berkisar 40-50 persen produk yang dikonsumsi di wilayah domestik, digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga. PMTB yang menjadi gambaran investasi fisik di Sulawesi Utara menduduki urutan kedua, di kisaran 30-40 persen. Ekspor juga mempunyai peran yang relatif besar, yakni sekitar 10-20 persen produk Sulawesi Utara mampu menembus pasar internasional. Net ekspor antar daerah negatif menunjukkan kondisi defisit, yaitu nilai impor antar daerah lebih tinggi dibandingkan nilai ekspornya. Hal ini berarti bahwa Sulawesi Utara masih bergantung terhadap produk barang dan jasa dari luar provinsi.

Tabel 4
Pertumbuhan Ekonomi PDRB Menurut Pengeluaran (Persentase), 2011 – 2015

Komponen Pengeluaran	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	4.95	5.88	5.93	5.71	6.44
2. Konsumsi LNPRT	6.08	8.90	2.81	4.23	0.25
3. Konsumsi Pemerintah	10.29	7.02	7.05	8.42	9.94
4. PMTB	9.04	1.86	4.30	2.14	9.08
5. Perubahan Inventori	(135.85)	117.43	(61.32)	(0.28)	(63.28)
6. Ekspor Luar Negeri	71.40	27.42	(21.39)	33.42	(11.70)
7. Impor Luar Negeri	41.18	(6.64)	3.73	7.21	(0.88)
8. Net Ekspor Antar Daerah	60.14	15.37	(23.45)	21.77	(1.38)
Total PDRB	6.17	6.86	6.38	6.31	6.12

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara dari tahun 2011-2015 secara rata-rata mencapai 6,37 persen, dengan masing-masing pertumbuhan sebesar 6,17 persen (2011); 6,86 persen (2012); 6,38 persen (2013); 6,31 persen (2014) dan 6,12 persen (2015). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012 yakni sebesar 6,86 persen. Selama 3 tahun terakhir ini pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara cenderung mengalami perlambatan sejalan dengan perlambatan ekonomi nasional.

Sementara itu, indeks implisit PDRB yang menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintahan) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri) juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun (Tabel 5).

Tabel 5
Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran, 2011 - 2015

Komponen Pengeluaran	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	105.05	109.40	109.53	115.32	124.14
2. Konsumsi LNPRT	102.78	106.53	108.69	117.09	125.23
3. Konsumsi Pemerintah	108.49	111.77	116.05	121.48	128.11
4. PMTB	104.97	103.06	104.81	109.53	116.86
5. Perubahan Inventori	108.30	108.39	116.45	116.75	113.02
6. Ekspor Luar Negeri	101.39	105.13	112.81	126.08	121.39
7. Impor Luar Negeri	98.85	105.97	116.46	126.35	118.80
8. Net Ekspor Antar Daerah	108.76	99.13	79.50	85.20	78.98
Total PDRB	104.43	108.86	113.90	121.48	129.62

Kenaikan harga dimaksud selanjutnya diistilahkan dengan Inflasi PDRB. Inflasi PDRB dapat digunakan sebagai tolok ukur stabilitas perekonomian suatu wilayah. Inflasi PDRB yang tinggi (mencapai dua digit) relatif mencerminkan stabilitas ekonomi yang kurang baik dan demikian pula sebaliknya. Tentunya hal tersebut juga harus mempertimbangkan kondisi-kondisi tertentu penyebab tingginya inflasi PDRB tersebut.

Tabel 6 menunjukkan bahwa perkembangan inflasi PDRB Provinsi Sulawesi Utara selama periode 2011-2015 relatif stabil dengan inflasi PDRB berada pada kisaran 4 hingga 7 persen. Pada tahun 2015, inflasi PDRB Provinsi Sulawesi Utara merupakan yang tertinggi (6,70 persen) selama 5 tahun terakhir.

Tabel 6
Inflasi PDRB Menurut Pengeluaran, 2011 - 2015

Komponen Pengeluaran	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	5.05	4.14	0.12	5.29	7.65
2. Konsumsi LNPRT	2.78	3.65	2.02	7.73	6.95
3. Konsumsi Pemerintah	8.49	3.02	3.83	4.68	5.46
4. PMTB	4.97	(1.82)	1.69	4.51	6.69
5. Perubahan Inventori	8.30	0.09	7.43	0.26	(3.19)
6. Ekspor Luar Negeri	1.39	3.69	7.30	11.76	(3.72)
7. Impor Luar Negeri	(1.15)	7.19	9.90	8.50	(5.98)
8. Net Ekspor Antar Daerah	8.76	(8.85)	(19.80)	7.16	(7.30)
Total PDRB	4.43	4.24	4.63	6.65	6.70

3.2 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi terbesar dalam PDRB menurut pengeluaran. Data berikut menunjukkan bahwa sebagian besar produk domestik dan produk impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga.

Tabel 7
Perkembangan Komponen Konsumsi Akhir Rumah Tangga
2011 – 2015

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	28,031.77	30,908.68	32,781.30	36,486.28	41,806.11
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	26,684.86	28,253.94	29,929.89	31,638.84	33,676.77
Proporsi terhadap PDRB (%ADHB)	48.88	48.39	46.11	45.26	45.80
Rata-rata konsumsi per-Rumah Tangga/ tahun (<i>Ribu Rp</i>)					
a. ADHB	47,438	51,697	54,212	59,685	67,722
b. ADHK 2010	45,159	47,257	49,496	51,755	54,553
Rata-rata konsumsi per kapita per tahun (<i>Ribu Rp</i>)					
a. ADHB	12,157	13,246	13,888	15,288	17,332
b. ADHK 2010	11,572	12,108	12,680	13,257	13,962
Pertumbuhan					
a. Total konsumsi RT	4.95	5.88	5.93	5.71	6.44
b. Per RT	3,68	4.64	4.74	4.56	5.41
c. Per kapita	3,67	4.63	4.72	4.55	5.32
Jumlah RT (<i>unit</i>)	590,908	597,883	604,692	611,314	617,322
Jumlah penduduk (<i>000 org</i>)	2,306	2,334	2,360	2,387	2,412

Tabel 7 menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2011-2015, pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan baik dalam nominal (adh Berlaku) maupun riil (adh Konstan), dan sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode tahun 2011-2015 cukup berfluktuatif. Titik tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu 48,88 persen dan titik terendah terjadi pada tahun 2014 yaitu 45,26 persen.

Secara umum, rata-rata konsumsi per rumah tangga terus meningkat dari tahun ke tahun, baik menurut adh Berlaku maupun adh Konstan 2010. Pada tahun 2011, secara umum setiap rumah tangga di Sulawesi Utara menghabiskan dana sekitar 47,4 juta rupiah setahun, untuk membiayai konsumsi baik dalam bentuk makanan

maupun non makanan (sandang, perumahan, pendidikan, dsb). Pengeluaran ini terus meningkat menjadi 51,7 juta rupiah (2012); 54,2 juta rupiah (2013); 59,7 juta rupiah (2014); dan menjadi 67,2 juta rupiah (2015).

Sementara itu, pada perkiraan adh Konstan 2010, rata-rata konsumsi rumah tangga per rumah tangga tumbuh di kisaran 3-5 persen, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi di tahun 2013, yakni sebesar 4,74 persen. Di sisi lain, rata-rata konsumsi per kapita juga menunjukkan kecenderungan yang searah dengan kenaikan jumlah penduduk, dan selalu diikuti pula oleh kenaikan nilai konsumsinya. Pertumbuhan rata-rata konsumsi per kapita menunjukkan peningkatan, baik adh Berlaku maupun adh Konstan 2010. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi setiap penduduk di Provinsi Sulawesi Utara meningkat, baik secara kuantitas (*volume*) maupun secara nilai (termasuk juga peningkatan kualitas). Rata-rata konsumsi per kapita secara “riil” tumbuh berkisar antara 3-6 persen. Peningkatan ini secara otomatis berpengaruh terhadap perubahan struktur konsumsi rumah tangga.

Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga adh Konstan di tahun 2011 adalah sebesar 4,95 persen. Kemudian meningkat pada tiga tahun berikutnya, yaitu berturut-turut sebesar 5,88 persen (2012); 5,93 persen (2013); 5,71 persen (2014) dan 6,44 persen (2015). Sementara itu, konsumsi per kapita tumbuh 3,67 persen ditahun 2011; 4,63 persen di tahun 2012; 4,72 persen di tahun 2013; 4,55 persen di tahun 2014; dan 5,32 persen di tahun 2015. Terlihat bahwa peningkatan keseluruhan konsumsi rumah tangga secara “riil” lebih tinggi dari peningkatan jumlah penduduk. Hal ini mengindikasikan terjadi perubahan tingkat kemakmuran masyarakat, meskipun tidak dapat dijelaskan lebih jauh melalui perangkat data PDRB ini.

Secara rata-rata dari tahun 2011-2015, nampak pada struktur konsumsi akhir rumah tangga Sulawesi Utara, bahwa konsumsi non makanan lebih tinggi dibandingkan konsumsi makanan. Proporsi pengeluaran untuk makanan cenderung berada di kisaran yang sama, yaitu 45,12 persen (2011); 44,38 persen (2012); 42,97 persen (2013); 41,98 persen (2014); dan 41,64 persen (2015).

Tabel 8
Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga
2011 - 2015

Kelompok Konsumsi	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	45.12	44.38	42.97	41.98	41.64
b. Pakaian dan Alas Kaki	0.35	0.25	0.25	0.27	0.27
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	7.79	8.33	8.37	8.76	9.03
d. Kesehatan dan Pendidikan	7.69	8.29	7.88	7.92	7.75
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	31.67	31.23	33.00	33.29	33.56
f. Hotel dan Restoran	4.83	4.90	4.99	5.17	5.25
g. Lainnya	2.55	2.62	2.54	2.61	2.49
Total Konsumsi	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Pola proporsi konsumsi di atas menunjukkan tarik menarik antara kebutuhan rumah tangga atas makanan dan non makanan yang masih cukup kuat. Sungguhpun demikian, pengeluaran untuk kebutuhan non makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut di antaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan dan sebagainya.

Tabel 9
Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga
2011 – 2015

Kelompok Konsumsi	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	2.25	2.96	3.51	3.86	4.08
b. Pakaian dan Alas Kaki	0.84	3.75	9.35	9.08	9.83
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	10.12	9.44	9.54	9.39	9.28
d. Kesehatan dan Pendidikan	6.96	7.96	5.06	8.89	8.23
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	4.86	7.82	8.05	5.89	8.22
f. Hotel dan Restoran	11.00	10.14	8.85	8.07	6.75
g. Lainnya	26.77	7.79	4.87	7.72	5.93
Total Konsumsi	4.95	5.88	5.93	5.71	6.44

Dilihat dari pertumbuhan “riil” nya, pengeluaran rumah tangga untuk kelompok bukan makanan menunjukkan fluktuasi, dengan masing-masing sebesar 7,26 persen (2011); 8,26 persen (2012); 7,81 persen (2013); 7,09 persen (2014) dan 8,15 persen (2015). Pertumbuhan “riil” ini menunjukkan adanya perubahan konsumsi rumah tangga dalam bentuk kuantum (volume) dari waktu ke waktu. Informasi ini menunjukkan terjadinya peningkatan kemakmuran masyarakat, meskipun mungkin hanya dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu.

Sementara itu, tingkat perubahan harga yang secara implisit disajikan dalam tabel 10 menunjukkan fluktuasi harga setiap tahunnya untuk setiap kelompok konsumsi. Peningkatan harga relatif tinggi terjadi pada tahun 2011, dan pada tahun-tahun berikutnya pergerakan harga berfluktuasi.

Tabel 10
Pertumbuhan Inflasi PDRB
Komponen Konsumsi Akhir Rumah Tangga, 2011 – 2015

Kelompok Konsumsi	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	5.67	5.33	(0.81)	4.71	9.20
b. Pakaian dan Alas Kaki	19.67	(24.44)	0.04	7.56	6.75
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	3.84	7.79	(2.77)	6.48	8.16
d. Kesehatan dan Pendidikan	13.64	10.15	(4.12)	2.84	3.54
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	3.17	0.83	3.73	6.03	6.73
f. Hotel dan Restoran	2.47	1.56	(0.81)	6.74	9.02
g. Lainnya	1.09	4.98	(1.61)	5.89	3.27
Total Konsumsi	5.05	4.14	0.12	5.29	7.65

3.3 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Peranan pengeluaran konsumsi akhir LNPRT dalam PDRB menurut pengeluaran sangat minor dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian suatu wilayah semestinya dapat lebih ditingkatkan lagi. Data berikut menunjukkan proporsinya terhadap PDRB menurut pengeluaran selama periode tahun 2011-2015 hanya berada di kisaran 2 persen.

Tabel 11
Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT

U r a i a n	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	1,257.57	1,419.42	1,488.74	1,671.67	1,792.36
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	1,223.51	1,332.38	1,369.77	1,427.68	1,431.27
Proporsi terhadap PDRB (%ADHB)	2.19	2.22	2.09	2.07	1.96

2011 – 2015

Berdasarkan tabel 11, pengeluaran konsumsi akhir LNPRT baik adh Berlaku maupun adh Konstan 2010, selama periode tahun 2011-2015, mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut digerakkan oleh aktivitas hari besar keagamaan seperti Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Perayaan Natal; Pilkada di beberapa kabupaten/kota seperti Kepulauan Sangihe, Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kepulauan Talaud, Minahasa Tenggara, Bolmong Utara dan Kotamobagu. Selain itu di tahun 2015 ada pelaksanaan pemilu kepala daerah. Jumlah lembaga non profit yang melayani rumah tangga juga meningkat dari tahun ke tahun, dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 4 persen.

3.4 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Konsumsi akhir pemerintah bersama dengan pengeluaran akhir rumah tangga dan LNPR^T merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam suatu perekonomian suatu wilayah. Peranan konsumsi pemerintah dalam perekonomian Provinsi Sulawesi Utara serta perkembangannya akan dijelaskan dalam uraian dibawah ini.

Tabel 12
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah
2011 – 2015

U r a i a n	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	10.078	11.110	12.350	14.016	16.250
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	9.289	9.941	10.642	11.538	12.684
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	17,57	17,39	17,37	17,39	17,80
Konsumsi Pemerintah per- kapita (<i>Ribu Rp</i>)					
a. ADHB	4.370	4.761	5.232	5.873	6.737
b. ADHK 2010	4.028	4.260	4.508	4.834	5.259
Konsumsi Pemerintah per- pegawai pemerintah (<i>Ribu Rp</i>)					
a. ADHB	124.843	140.716	159.864	175.946	250.951
b. ADHK 2010	115.071	125.902	137.755	144.834	195.883
Pertumbuhan					
a. Total konsumsi pemerintah	10,29	7,02	7,05	8,42	9,94
b. Konsumsi per kapita	8,93	5,75	5,83	7,23	8,77
c. Konsumsi per pegawai	8,88	9,41	9,41	5,14	35,25
Jumlah Pegawai Pemerintah	80.723	78.955	77.252	79.661	64.753
Jumlah penduduk (<i>000 org</i>)	2.306	2.334	2.360	2.387	2.412

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik untuk adh Berlaku maupun adh Konstan 2010. Pada tahun 2011 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah adh Berlaku sebesar 10,1 triliun rupiah, kemudian meningkat terus hingga pada tahun 2015 nilainya mencapai 16,2 triliun rupiah.

Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah adh Konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan di masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB juga mengalami peningkatan, dari 17,57 persen di tahun 2011 menjadi 17,80 persen di tahun 2015. Peningkatan tersebut cenderung didominasi oleh pengeluaran pemerintah untuk konsumsi kolektif.

Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang

diberikan kepada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah per kapita. Pada tahun 2011 konsumsi pemerintah per kapita adh Berlaku senilai 4.370 ribu rupiah, dan terus meningkat hingga tahun 2015 mencapai 6.737 ribu rupiah (lihat tabel 12).

Rata-rata konsumsi pemerintah per kapita adh Konstan (2010) juga menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya (lihat tabel 12). Peningkatan tersebut menunjukkan adanya peningkatan pengeluaran konsumsi pemerintah secara kuantitas. Hal tersebut juga dapat dilihat dari laju pertumbuhannya yang sebesar 8,93 persen di tahun 2011; 5,75 persen (2012); 5,83 persen (2013); 7,23 persen (2014); dan 8,77 persen (2015).

Rata-rata konsumsi per pegawai pemerintah menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Pada tahun 2011 konsumsi pemerintah per pegawai pemerintah sebesar 124,84 juta rupiah, kemudian meningkat pada tahun-tahun berikutnya hingga tahun 2015 mencapai 250,95 juta rupiah (lihat tabel 12). Pada tingkat harga konstan 2010 indikator pemerataan menurut pegawai ini juga menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Persentase kenaikan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2015 yang naik hingga sebesar 35,25 persen.

Jumlah pegawai pemerintah dari tahun ke tahun mengalami naik turun. Penurunan jumlah pegawai pemerintah terjadi berkenaan dengan adanya kebijakan moratorium CPNS di tahun 2015. Pada tahun 2011 jumlah pegawai pemerintah berjumlah 80.723 orang dan terus menerus mengalami penurunan hingga di tahun 2015 jumlah pegawai pemerintah hanya sebesar 64.753 orang.

Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara “riil” menunjukkan peningkatan baik secara keseluruhan maupun rata-rata (per penduduk maupun per pegawai pemerintah). Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas penggunaan sumber daya finansial oleh pemerintah. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2011, dengan rincian untuk total konsumsi pemerintah sebesar 10,29 persen; untuk konsumsi per kapita 8,93 persen; sedangkan untuk konsumsi per pegawai pertumbuhan tertinggi terjadi di tahun 2012, yaitu sebesar 9,41 persen.

Rasio antara penduduk dengan pegawai pemerintah dalam kurun waktu tersebut cenderung menurun dengan masing-masing adalah 29 (2011); 30 (2012); 31 (2013); 30 (2014); dan 37 (2015). Hal ini berarti rata-rata setiap tahun, selama periode 2011-2015, setiap satu pegawai pemerintah melayani sekitar 31 penduduk.

Secara struktur, bagian terbesar dari pengeluaran pemerintah adalah untuk konsumsi kolektif, yakni sekitar 60 persen. Secara nominal dan proporsinya terhadap total konsumsi akhir pemerintah, pengeluaran konsumsi kolektif meningkat dari tahun ke tahun (lihat tabel 12). Proporsinya di tahun 2011 sebesar 57,81 dan terus meningkat hingga di tahun 2015 mencapai 61,91 persen.

Tabel 13
Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah
2011 – 2015

U r a i a n	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Struktur Konsumsi Akhir (Belanja) Pemerintah					
a. Konsumsi Kolektif (<i>Miliar Rp</i>)	5.826	6.561	7.495	8.694	10.060
<i>Distribusi (%)</i>	57,81	59,06	60,69	62,03	61,91
b. Konsumsi Individu (<i>Miliar Rp</i>)	4.252	4.549	4.855	5.322	6.190
<i>Distribusi (%)</i>	42,19	40,94	39,31	37,97	38,09
Total Konsumsi (<i>Miliar Rp</i>)	10.078	11.110	12.350	14.016	16.250
<i>Distribusi (%)</i>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan riil (ADHK2010) (%)					
a. Konsumsi Kolektif	15,35	8,47	3,81	6,25	10,42
b. Konsumsi Individu	3,35	4,79	12,18	11,59	9,27
Total Konsumsi	10,29	7,02	7,05	8,42	9,94
Pertumbuhan indeks implisit (%)					
a. Konsumsi Kolektif	3,74	3,83	10,03	9,17	4,79
b. Konsumsi Individu	15,75	2,09	(4,87)	(1,76)	6,44
Total Konsumsi	8,49	3,02	3,83	4,68	5,46

3.5 PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital). Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Selain peningkatan yang terjadi pada komponen konsumsi akhir (rumah tangga maupun pemerintah), PMTB juga menunjukkan peningkatan baik secara nominal maupun riil. Data di atas menjelaskan bahwa secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2011-2015 berfluktuasi, yakni 9,04 persen (2011); 1,86 persen (2012); 4,30 persen (2013); 2,14 persen (2014); dan menjadi 9,08 persen (2015).

Tabel 14
Perkembangan dan Struktur PMTB
2011 – 2015

U r a i a n	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	23,053	23,054	24,452	26,102	30,380
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	21,961	22,370	23,331	23,831	25,996
Proporsi terhadap PDRB					
(% - ADHB)	38.94	40.20	36.09	34.39	32.38
Struktur PMTB					
a. Bangunan (<i>Miliar Rp</i>)	21,142	21,143	22,401	23,978	28,679
<i>Distribusi (%)</i>	<i>91.71</i>	<i>91.71</i>	<i>91.61</i>	<i>91.86</i>	<i>94.40</i>
b. Non Bangunan (<i>Miliar Rp</i>)	1,911	1,911	2,052	2,125	1,701
<i>Distribusi (%)</i>	<i>8.29</i>	<i>8.29</i>	<i>8.39</i>	<i>8.14</i>	<i>5.60</i>
Total PMTB (<i>Miliar Rp</i>)	23,053	23,054	24,452	26,102	30,380
<i>Distribusi (%)</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
Pertumbuhan (%)					
a. Bangunan	12.43	(0.66)	4.83	2.51	11.53
b. Non Bangunan	(18.84)	30.60	(0.28)	(1.20)	(14.03)
Total PMTB	9.04	1.86	4.30	2.14	9.08
Pertumbuhan indeks implisit (%)					
a. Konsumsi Kolektif	4.72	0.67	1.07	4.42	7.24
b. Konsumsi Individu	7.85	(23.43)	7.67	4.82	(6.89)
Total Konsumsi	4.97	(1.82)	1.69	4.51	6.69

Sub komponen bangunan merupakan komponen dengan proporsi terbesar dalam pembentukan modal tetap. Proporsi non bangunan terhadap total PMTB relatif berfluktuasi selama periode 2011-2015 (tabel 14). Perubahan yang terjadi pada proporsi tersebut tidak lepas dari pengaruh pertumbuhan yang terjadi pada masing-masing sub komponen PMTB tersebut.

Pertumbuhan “riil” sub komponen bangunan pada tahun 2011 tumbuh sebesar 12,43 persen. Pada tahun 2012, sub komponen bangunan mengalami pertumbuhan negatif yakni minus 0,66 persen, dan kemudian meningkat di tahun-tahun berikutnya, yaitu masing-masing sebesar 4,83 persen (2013), 2,51 persen (2014) dan 11,53 persen (2015). Sementara sub komponen non bangunan mengalami fluktuasi pertumbuhan dari minus 18,84 persen (2011) menjadi tumbuh positif sebesar 30,60 persen (2012), dan kembali turun di tahun 2013 hingga 2015, yakni minus 0.28 persen (2013), minus 1,20 persen (2014) dan minus 14.03 persen.

3.6 PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “**persediaan**” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Tabel 15
Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori
2011 - 2015

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB (Miliar Rp)	62.03	134.99	56.09	56.08	19.93
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	57.28	124.54	48.17	48.03	17.64
Proporsi terhadap PDRB					
(% - ADHB)	0.11	0.21	0.08	0.07	0.02

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah, bahwa proporsi dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).

Dilihat adh Berlaku, di tahun 2011 perubahan inventori tercatat sebesar 62,03 miliar rupiah, 134,99 miliar rupiah (2012), 56,09 miliar rupiah (2013), 56,08 miliar rupiah (2014), dan 19,93 miliar rupiah (2015). Proporsi komponen ini terhadap total PDRB juga sangat kecil, di bawah 1 persen.

3.7 PERKEMBANGAN EKSPOR BARANG DAN JASA LUAR NEGERI

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi domestik, tetapi dikonsumsi oleh pihak luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

Tabel 16
Perkembangan Ekspor Luar Negeri Barang dan Jasa
2011 – 2015

U r a i a n	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Ekspor Luar Negeri					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	9,406	12,427	10,482	15,630	13,287
b. ADHK 2000 (<i>Miliar Rp</i>)	9,276	11,820	9,292	12,397	10,946
Proporsi terhadap PDRB					
(% - ADHB)	16.40	19.45	14.74	19.39	14.56
Struktur Ekspor Luar Negeri					
a. Barang (<i>Miliar Rp</i>)	8,975	11,911	9,949	15,105	12,710
<i>Distribusi (%)</i>	<i>95.42</i>	<i>95.85</i>	<i>94.91</i>	<i>96.64</i>	<i>95.66</i>
b. Jasa (<i>Miliar Rp</i>)	431	516	533	525	577
<i>Distribusi (%)</i>	<i>4.58</i>	<i>4.15</i>	<i>5.09</i>	<i>3.36</i>	<i>4.34</i>
Total ekspor (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan					
- Barang	76.15	28.07	(22.04)	35.70	(12.10)
- Jasa	9.33	13.66	(6.02)	(11.40)	0.16
Total ekspor	71.40	27.42	(21.39)	33.42	(11.70)

Secara total, nilai ekspor luar negeri selama periode 2011-2015 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011, ekspor luar negeri Sulawesi Utara tercatat senilai 9,4 triliun rupiah dan terus meningkat menjadi 12,4 triliun rupiah di tahun 2012. Di tahun 2013, nilai ekspor luar negeri sempat turun menjadi 10,5 triliun rupiah, namun kembali meningkat di tahun 2014, yakni mencapai 15,6 triliun rupiah. Tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 13,3 triliun rupiah dikarenakan oleh turunnya harga komoditas ekspor Sulawesi Utara di pasar global dan melambatnya perekonomian negara-negara tujuan ekspor. Sejalan dengan nilai ekspor adh Berlaku, nilai ekspor adh Konstan 2010 juga menunjukkan arah pertumbuhan yang sama, yaitu cenderung berfluktuasi dengan nilai “riil” masing-masing tahun sebesar 9,3 triliun rupiah (2011); 11,8 triliun rupiah (2012); 9,3 triliun rupiah (2013); 12,4 triliun rupiah (2014); dan 10,9 triliun rupiah (2015).

Menurut komposisinya, sebagian besar ekspor luar negeri Sulawesi Utara berupa barang (rata-rata 90 persen), sisanya adalah ekspor dalam bentuk jasa, sedangkan pertumbuhan riil total ekspor mencapai angka yang

sangat tinggi, khususnya pada tahun 2011 mencapai 71,40 persen dan tahun 2014 sebesar 33,42 persen. Pertumbuhan yang tinggi tersebut disebabkan adanya peningkatan volume ekspor dalam bentuk barang. Sementara itu pertumbuhan negatif terjadi di tahun 2013 (minus 21,39 persen) dan tahun 2015 (minus 11,70 persen). Pertumbuhan negatif pada tahun 2015 tersebut didorong oleh penurunan ekspor lemak dan minyak hewan/nabati; perhiasan/permata dan kopi, teh dan rempah-rempah yang cukup dalam, dan penurunan impor bahan bakar mineral selama tahun 2015.

3.8 PERKEMBANGAN IMPOR BARANG DAN JASA LUAR NEGERI

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Sulawesi Utara. Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangi nilai PDRB (E) dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor).

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongannya bisa berbeda dengan ekspor. Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor menunjukkan semakin kuatnya ketergantungan Sulawesi Utara terhadap ekonomi atau produk negara lain. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Sulawesi Utara di luar negeri, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa).

Tabel 17 menunjukkan bahwa pola perkembangan impor Sulawesi Utara pada periode tahun 2011-2015 cenderung meningkat (baik *adh Berlaku* maupun *adh Konstan* 2010). Namun pada tahun 2011 nilai impor luar negeri *adh konstan* 2010 mengalami penurunan yakni dari 2,2 triliun rupiah di tahun 2011 menjadi 2,1 triliun rupiah di tahun 2012. Pada tahun-tahun berikutnya (2013-2015) nilai impor terus mengalami peningkatan hingga 2,4 triliun rupiah .

Proporsi impor luar negeri terhadap PDRB berada di kisaran 3-4 persen. Pada tahun 2011 proporsinya sebesar 3,96 persen, dan menurun di tahun 2015 menjadi 3,07 persen. Di sisi lain, secara riil nilai impor luar negeri mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2011 sebesar 41,18 persen. Pada tahun berikutnya pertumbuhan impor luar negeri turun menjadi minus 6,64 persen. Di tahun 2013 dan 2014 kembali tumbuh positif menjadi 3,73 persen (2013) dan 7,21 persen (2014). Dan pada tahun 2015 menurun menjadi minus 0,88 persen yang disebabkan oleh melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap USD dan melemahnya permintaan domestik

Tabel 17
Perkembangan Impor Luar Negeri Barang dan Jasa
2011 - 2015

U r a i a n	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Impor Luar Negeri					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	2,268	2,270	2,588	3,011	2,806
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	2,295	2,142	2,222	2,383	2,362
Proporsi thd PDRB (% ADHB)	3.96	3.55	3.64	3.73	3.07
Struktur Impor					
a. Barang (<i>Miliar Rp</i>)	8,975	11,911	9,949	15,105	12,710
<i>Distribusi (%)</i>	95.42	95.85	94.91	96.64	95.66
b. Jasa (<i>Miliar Rp</i>)	921	1,057	1,331	1,442	1,697
<i>Distribusi (%)</i>	9.79	8.51	12.70	9.23	12.77
Total impor (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan					
- Barang	103.96	(14.56)	(2.38)	18.30	(19.40)
- Jasa	(2.92)	5.04	11.07	(4.48)	23.31
Total impor	41.18	(6.64)	3.73	7.21	(0.88)

3.9 PERKEMBANGAN NET EKSPOR ANTAR DAERAH

Net ekspor antar daerah didefinisikan sebagai ekspor antar daerah dikurangi impor antar daerah. Berbeda dengan penghitungan ekspor-impor barang dan jasa luar negeri, pada penghitungan ekspor-impor antar daerah tidak tersedia sumber data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Sumber data yang tersedia selama ini hanya menunjukkan adanya transaksi namun tidak diketahui berapa nilai uang yang terjadi dalam transaksi tersebut. Keberadaan data dengan kondisi seperti ini menyebabkan penghitungan ekspor-impor antar provinsi menjadikan komponen ini (dalam series PDRB adh Konstan 2010) diperlakukan sebagai item penyeimbang (residual), yakni perbedaan antara total PDRB menurut pengeluaran dengan total PDRB menurut lapangan usaha. Ketersediaan data yang ada lebih sesuai untuk dimanfaatkan sebagai informasi pendukung.

Komponen ini secara implisit mencakup dua unsur pokok yaitu: ekspor antar daerah dan impor antar daerah. Sama halnya dengan perubahan inventori, net ekspor antar daerah juga hasilnya dapat memiliki 2 (dua) angka, positif atau negatif. Jika komponen ini bertanda “positif” berarti nilai ekspor antar daerah lebih besar dari pada impor antar daerah, demikian pula sebaliknya.

Pada saat ini untuk memisahkan net ekspor antar daerah menjadi nilai ekspor antar daerah dan nilai impor antar daerah dilakukan dengan metode tidak langsung, yaitu dengan metode *cross hauling*. Metode ini bekerja dengan memanfaatkan sifat keseimbangan permintaan (*demand*) dan penyediaan (*supply*) setiap komoditas di suatu perekonomian. Penghitung ekspor impor dengan metode *cross-hauling* diawali dengan metode *commodity balance*. Metode *commodity balance* adalah metode penghitungan ekspor-impor dengan memanfaatkan Tabel Input-Output “bayangan”. Dalam metode ini, transaksi ekspor-impor dipandang sebagai item penyeimbang (*balancing item*) dalam keseimbangan *demand* dan *supply* suatu perekonomian.

Tabel 18
Perkembangan Net Ekspor Antar Daerah
2011 - 2015

U r a i a n	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Net Ekspor Antar Daerah					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	(12,275)	(12,908)	(7,925)	(10,342)	(9,454)
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	(11,286)	(13,021)	(9,968)	(12,138)	(11,971)
Proporsi thd PDRB (% ADHB)	(21.41)	(20.21)	(11.15)	(12.83)	(10.36)
Nilai Net Ekspor Antar Daerah					
a. Ekspor (<i>Miliar Rp</i>)	11,451	14,588	10,191	11,841	6,942
b. Impor (<i>Miliar Rp</i>)	23,726	27,496	18,116	22,182	16,396
Pertumbuhan					
- Ekspor	44.63	36.88	(21.25)	5.22	(31.79)
- Impor	52.74	25.09	(22.36)	13.47	(15.52)
Total Net Ekspor Antar Daerah	60.14	15.37	(23.45)	21.77	(1.38)

- Halaman ini sengaja dikosongkan-

<http://bitungkota.bps.go.id>



Bab IV
Perkembangan Agregat
PDRB Menurut Pengeluaran
Sulawesi Utara

<http://bitungkota.bps.go.id>

- Halaman ini sengaja dikosongkan-

<http://bitungkota.bps.go.id>

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1 PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari *series* data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, maka disajikan data PDRB per kapita.

Tabel 19
Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per kapita
2011 – 2015

U r a i a n	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (<i>Miliar Rp</i>)					
- ADHB	57,344	63,875	71,097	80,611	91,275
- ADHK 2010	54,911	58,678	62,422	66,359	70,419
PDRB per kapita (<i>Ribu Rp</i>)					
- ADHB	24,868	27,373	30,121	33,776	37,841
- ADHK 2010	23,813	25,146	26,446	27,805	29,194
Pertumbuhan					
Total PDRB	6.17	6.86	6.38	6.31	6.12
PDRB per kapita ADHK 2010	4,87	5.60	5.17	5.14	5.00
Jumlah penduduk (<i>000 org</i>)	2,306	2,334	2,360	2,387	2,412
Pertumbuhan	1,24	1.20	1.15	1.11	1.07

PDRB per kapita Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun (tabel 19), seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Sulawesi Utara rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai per kapita di masing-masing tahun tersebut.

Sementara itu pertumbuhan per kapita secara “riil” juga selalu meningkat di kisaran 4-5 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti pula oleh penambahan jumlah penduduk, yang meningkat rata-rata pada kisaran 1 persen setiap tahunnya. Dengan demikian maka pertumbuhan per kapita tersebut tidak saja terjadi secara “riil” tetapi juga terjadi secara kualitas.

4.2 PERBANDINGAN PDRB PENGELUARAN UNTUK KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP EKSPOR

Indikator ini menunjukkan perbandingan antara produk yang dikonsumsi RT di wilayah domestik dengan produk yang diekspor. Selama ini konsumsi rumah tangga mempunyai kontribusi yang sangat dominan dalam penggunaan PDB Indonesia (sekitar 60 persen), yang artinya bahwa seluruh produk yang dihasilkan di wilayah Indonesia sebagian besar digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga. Namun di dalamnya termasuk pula sebagian produk yang berasal dari impor.

Tabel 20
Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir
Rumah Tangga terhadap Ekspor, 2011 - 2015

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB)					
(Miliar Rp)	28,032	30,909	32,781	36,486	41,806
Total Ekspor (ADHB)					
(Miliar Rp)	9,406	12,427	10,482	15,630	13,287
Perbandingan Konsumsi RT terhadap Ekspor	2.98	2.49	3.13	2.33	3.15

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015, produk yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga lebih dari 3,15 kali dari yang diekspor. Hal ini berarti bahwa sebagian besar penyediaan (*supply*) domestik diserap untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir rumah tangga. Penurunan rasio yang relatif tajam pada tahun 2014 (2,33) lebih disebabkan karena laju kenaikan nilai konsumsi rumah tangga lebih lambat dibandingkan dengan kenaikan nilai ekspor. Peningkatan dan penurunan tersebut disebabkan oleh perubahan volume maupun harga.

4.3 PERBANDINGAN PDRB PENGELUARAN UNTUK KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB

Rasio ini merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap). Sekilas nampak bahwa sebagian besar penggunaan produk yang tersedia di wilayah domestik Sulawesi Utara digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga.

Tabel 21
Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB (ADHB)
2011 - 2015

U r a i a n	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (<i>Miliar Rp</i>)	28,032	30,909	32,781	36,486	41,806
Total PMTB (<i>Miliar Rp</i>)	23,053	23,054	24,452	26,102	30,380
Perbandingan Konsumsi RT thd PMTB	1.22	1.34	1.34	1.40	1.38

Seperti halnya terhadap ekspor, rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB sebesar 1,22 di tahun 2011; 1,34 di tahun 2012 dan 2013; 1,40 di tahun 2014; dan 1,38 di tahun 2015. Kenaikan rasio ini terjadi karena pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga bertambah lebih banyak dibandingkan PMTB.

4.4 PROPORSI KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Sebagian besar barang dan jasa yang berada di wilayah domestik digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (lebih dari 60 persen). Meskipun konsumsi akhir makin meningkat setiap tahunnya, namun proporsinya terhadap PDRB justru semakin mengalami penurunan. Dalam hal ini, produk yang tidak digunakan menjadi konsumsi akhir (PMTB atau ekspor) memiliki peran yang relatif kecil.

Tabel 22
Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB
2011 – 2015

U r a i a n	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) <i>Miliar Rp</i>					
a. Rumah tangga	28,032	30,909	32,781	36,486	41,806
b. LNPRT	1,258	1,419	1,489	1,672	1,792
c. Pemerintah	10,078	11,110	12,350	14,016	16,250
J u m l a h	39,367	43,438	46,620	52,174	59,848
PDRB (ADHB) <i>Miliar Rp</i>	57,344	63,875	71,097	80,611	91,275
Proporsi	68.65	68.00	65.57	64.72	65.57

4.5 PERBANDINGAN EKSPOR TERHADAP PMTB

Ekspor merupakan produk yang tidak dikonsumsi di wilayah domestik, tetapi diperdagangkan ke luar negeri. Untuk menghasilkan produk yang diekspor kemungkinan besar menggunakan kapital (PMTB). Sementara di sisi lain sebagian barang yang diekspor bisa pula berupa barang kapital. Rasio ekspor terhadap PMTB dimaksudkan untuk menunjukkan perbandingan antara nilai produk ekspor dengan nilai produk yang menjadi kapital (PMTB).

Tabel 23
Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB), 2011 – 2015

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ekspor (ADHB)					
(Miliar Rp)	9,406	12,427	10,482	15,630	13,287
Total PMTB (ADHB)					
(Miliar Rp)	23,053	23,054	24,452	26,102	30,380
Rasio Ekspor terhadap PMTB	0.41	0.54	0.43	0.60	0.44

Selama periode 2011-2015, ekspor mempunyai nilai yang lebih rendah dari PMTB (tabel 23). Untuk menghasilkan seluruh produk domestik (termasuk ekspor) disyaratkan tersedianya sejumlah kapital (yang di dalamnya termasuk pula kapital impor). Penurunan rasio tersebut di antaranya disebabkan oleh kenaikan PMTB yang relatif lebih pesat dibandingkan dengan kenaikan ekspor.

4.6 PERBANDINGAN PDRB TERHADAP IMPOR

Rasio ini memberikan gambaran tentang perbandingan antara produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik (PDRB) dengan produk yang berasal dari impor. Selain itu data tersebut menjelaskan tentang ketergantungan PDRB terhadap produk yang dihasilkan oleh negara lain. Jika rasionya kecil berarti ketergantungan akan impor semakin tinggi, dan sebaliknya.

Tabel 24
Rasio PDRB terhadap Impor, 2011 – 2015

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHB)					
(Miliar Rp)	57,344	63,875	71,097	80,611	91,275
Total Impor (ADHB)					
(Miliar Rp)	2,268	2,270	2,588	3,011	2,806
Rasio PDRB terhadap Impor	25.28	28.14	27.47	26.78	32.53

Rasio PDRB terhadap impor tahun 2011 - 2015 menunjukkan fluktuasi dari 25,28 (2011) menjadi 28,14 (2012), 27,47 (2012), 26,78 (2013) dan 32,53 (2015). Rasio tertinggi yang terjadi pada tahun 2015 disebabkan peningkatan PDRB, sedangkan nilai impor justru menurun. Peningkatan rasio menunjukkan berkurangnya ketergantungan PDRB terhadap produk impor, dan sebaliknya.

4.7 KESEIMBANGAN TOTAL PENYEDIAAN DAN TOTAL PERMINTAAN

Rasio ini dapat menunjukkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi suatu daerah oleh produk yang berasal dari impor. Ketergantungan (ketidakseimbangan) tersebut dapat dilihat melalui keseimbangan antara total penyediaan (*supply*) dengan total permintaan akhir (*demand*).

Dari tabel 25 dapat dilihat bahwa untuk memenuhi permintaan akhir domestik, sebagian produk masih harus didatangkan dari luar negeri dan luar provinsi, dengan rentang 12-18 persen. Dengan kata lain, kebutuhan masyarakat baru bisa dipenuhi sekitar 82-88 persen dari selisih hasil produksi domestik. Dalam kurun waktu tersebut, tendensi permintaan (akhir) masyarakat terus meningkat setiap tahunnya, dari 66,7 triliun rupiah (2011) menjadi sebesar 104,6 triliun rupiah (2015).

Tabel 25
Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan
2011 - 2015

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Penyediaan					
PDRB (ADHB) Miliar Rp	57,344	63,875	71,097	80,611	91,275
<i>Distribusi (%)</i>	<i>85.91</i>	<i>83.71</i>	<i>87.15</i>	<i>83.76</i>	<i>87.29</i>
Total Impor (ADHB) Miliar Rp	9,406	12,427	10,482	15,630	13,287
<i>Distribusi (%)</i>	<i>14.09</i>	<i>16.29</i>	<i>12.85</i>	<i>16.24</i>	<i>12.71</i>
Total Permintaan Akhir (Miliar Rp)	66,749	76,302	81,579	96,241	104,562
<i>Distribusi (%)</i>	<i>100.00</i>	<i>100.00</i>	<i>100.00</i>	<i>100.00</i>	<i>100.00</i>

Di sisi lain “penyediaan” produk barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh ekonomi domestik masing-masing sebesar 57,3 triliun rupiah (2011); 63,8 triliun rupiah (2012); 71,1 triliun rupiah (2013); 80,6 triliun rupiah (2014); dan 91,3 triliun rupiah (2015). Karena produk domestik tidak mampu mencukupi seluruh kebutuhan permintaan, maka berbagai produk barang dan jasa diimpor.

4.8 NERACA PERDAGANGAN (*TRADE BALANCE*)

Transaksi devisa yang berasal dari perdagangan barang dan jasa dengan pihak luar negeri (non-residen) dapat dilihat melalui neraca perdagangan. Secara konsep, selisih antara nilai ekspor dan nilai impor disebut sebagai “**Ekspor Neto**”. Apabila nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, maka terjadi surplus, dan sebaliknya yang terjadi adalah defisit. Dilihat dari arus uang yang masuk atau keluar, apabila tingkat keseimbangan dalam posisi surplus, maka terjadi aliran devisa masuk, sebaliknya kalau posisinya defisit maka terjadi aliran devisa keluar. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kekuatan ekonomi suatu wilayah di antaranya ditentukan oleh proses tersebut.

Selain gambaran posisi neraca perdagangan, dapat juga dilihat perbandingan (rasio) antara nilai ekspor terhadap impor, meskipun hanya berlaku secara total. Namun rasio tersebut tidak dapat merefleksikan perbandingan menurut jenis komoditas, harga maupun kuantum. Apabila rasio lebih besar dari 1 (satu) maka nilai ekspor lebih tinggi daripada nilai impor, sebaliknya apabila rasio kurang dari 1 (satu) berarti nilai impor lebih tinggi dari pada nilai ekspor. Besar kecilnya ekspor atau impor suatu negara sangat tergantung kepada kondisi ekonomi serta kebutuhan masyarakatnya.

Tabel 26
Neraca Perdagangan Barang dan Jasa, 2011 - 2015

U r a i a n	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Ekspor (ADHB) (<i>Miliar Rp</i>)	20,856	27,015	20,673	27,471	20,229
Nilai Impor (ADHB) (<i>Miliar Rp</i>)	25,994	29,766	20,704	25,193	19,202
Net ekspor (X – M) (<i>Miliar Rp</i>)	(5,138)	(2,752)	(31)	2,278	1,027
Rasio ekspor thd impor	0.80	0.91	1.00	1.09	1.05

Selama periode 2011-2013, posisi perdagangan barang dan jasa Provinsi Sulawesi Utara dengan luar negeri dan antar provinsi, menunjukkan nilai negatif. Hal ini menunjukkan neraca perdagangan barang dan jasa Provinsi Sulawesi Utara selalu dalam posisi defisit. Nilai ekspor yang lebih rendah dari impor menyebabkan adanya aliran devisa keluar. Sedangkan tahun 2014-2015, posisi perdagangan barang dan jasa Provinsi Sulawesi Utara dengan luar negeri dan antar provinsi, menunjukkan nilai positif. Nilai ekspor yang lebih tinggi dari impor menyebabkan adanya aliran devisa masuk.

Defisit perdagangan Provinsi Sulawesi Utara yang terjadi antara tahun 2011 sampai dengan 2013 tercatat masing-masing sebesar minus 5,1 triliun rupiah (2011), minus 2,7 triliun rupiah (2012), dan minus 0,31 triliun rupiah (2013). Sedangkan surplus perdagangan yang terjadi antara tahun 2014-2015 tercatat masing-masing 2,3 triliun rupiah dan 1,0 triliun rupiah. Sementara rasio ekspor terhadap impor cenderung meningkat dari tahun 2011-2015. Pada tahun 2011 rasionya sebesar 0,80 menjadi sekitar 1,05 di tahun 2015.

4.9 RASIO PERDAGANGAN INTERNASIONAL (RPI)

Rasio ini menunjukkan perbandingan aktivitas perdagangan internasional dari suatu wilayah, apakah didominasi oleh ekspor atau impor luar negeri (LN). Formulasinya diperoleh dengan menghitung selisih antara ekspor LN dikurangi impor LN dibagi dengan jumlah ekspor LN dan impor LN. Koefisien RPI berkisar antara -1 s.d $+1$ ($-1 < RPI < +1$). Jika RPI berkisar antara minus 1, maka perdagangan internasional didominasi oleh impor, sedangkan apabila berkisar antara positif 1, maka perdagangan internasional didominasi oleh transaksi ekspor.

Data pada tabel berikut menunjukkan bahwa pada periode tahun 2011-2015, posisi ekspor selalu lebih tinggi dari impor. Kecenderungan nilai ekspor pada periode tersebut terus meningkat dari 9,4 triliun rupiah pada tahun 2011 menjadi 15,6 triliun rupiah pada tahun 2014. Namun mengalami penurunan di tahun 2015 menjadi sebesar 13,3 triliun. Begitu pula dengan kecenderungan impor, yang mempunyai pola hampir sama dengan ekspor, cenderung meningkat setiap tahun namun di tahun 2015 mengalami penurunan.

Tabel 27
Rasio Perdagangan Internasional,
Sulawesi Utara, 2011- 2015

U r a i a n	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Ekspor LN, ADHB (X) (Miliar Rp)	9,406	12,427	10,482	15,630	13,287
Nilai Impor LN, ADHB (M) (Miliar Rp)	2,268	2,270	2,588	3,011	2,806
(X – M) Miliar Rp	7,137	10,157	7,894	12,619	10,482
(X +M) Miliar Rp	11,674	14,697	13,070	18,641	16,093
R P I	0.61	0.69	0.60	0.68	0.65

Rasio Perdagangan Internasional Provinsi Sulawesi Utara pada periode 2011-2015 mengindikasikan bahwa perdagangan internasionalnya selalu didominasi oleh kegiatan ekspor, dengan rasio di kisaran 0,6-0,7 persen.

4.10 INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

”**ICOR**” merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter ”Nilai Tambah”. Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan

membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit.

Formula

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Keterangan: I_t = PMTB tahun ke t
 Y_t = Output tahun ke t
 Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

Tabel 28
Incremental Capital Output Ratio,
Sulawesi Utara, 2011 – 2015

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHK 2010) Miliar Rp	54,911	58,678	62,422	66,359	70,419
Perubahan (ADHK 2010) Miliar Rp	3,190	3,767	3,745	3,937	4,059
PMTB (ADHK 2010) Miliar Rp	21,961	22,370	23,331	23,831	25,996
ICOR	6.89	5.94	6.23	6.05	6.40

Data di atas menunjukkan besaran ICOR menurun dari sebesar 6,89 (2011) menjadi 5,94 (2012). Pada tahun 2013-2015 ICOR masing-masing adalah 6,23 (2013), 6,05 (2014) dan 6,40 (2015). Artinya ICOR di tahun 2015 yang sebesar 6,40 adalah penambahan kapital 1 miliar rupiah akan menambah output sebesar 6,40 miliar.



<http://bitungjota.bps.go.id>

Lampiran

- Halaman ini sengaja dikosongkan-

<http://bitungkota.bps.go.id>

Tabel 1
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran, Provinsi Sulawesi Utara
(Miliar Rupiah)

Komponen Pengeluaran (1)	Tahun				
	2011 (2)	2012 (3)	2013 (4)	2014 (5)	2015 (6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	28.032	30.909	32.781	36.486	41.806
1.a Makanan, Minuman, dan Rokok	12.649	13.718	14.085	15.318	17.409
1.b Pakaian dan Alas Kaki	97	76	84	98	115
1.c Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	2.184	2.576	2.743	3.195	3.777
1.d Kesehatan dan Pendidikan	2.155	2.563	2.582	2.891	3.240
1.e Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	8.878	9.653	10.819	12.147	14.030
1.f Hotel dan Restoran	1.354	1.514	1.635	1.886	2.195
1.g Lainnya	714	808	834	951	1.041
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR^T	1.258	1.419	1.489	1.672	1.792
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	10.078	11.110	12.350	14.016	16.250
3.a. Konsumsi Kolektif	5.826	6.561	7.495	8.694	10.060
3.b. Konsumsi Individu	4.252	4.549	4.855	5.322	6.190
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	23.053	23.054	24.452	26.102	30.380
4.a. Bangunan	21.142	21.143	22.401	23.978	28.679
4.b. Non-Bangunan	1.911	1.911	2.052	2.125	1.701
5. Perubahan Inventori	62	135	56	56	20
6. Ekspor Luar Negeri	9.406	12.427	10.482	15.630	13.287
6.a. Barang	8.975	11.911	9.949	15.105	12.710
6.b. Jasa	431	516	533	525	577
7. Impor Luar Negeri	2.268	2.270	2.588	3.011	2.806
7.a. Barang	1.347	1.213	1.257	1.568	1.109
7.b. Jasa	921	1.057	1.331	1.442	1.697
8. Net Ekspor Antar Daerah	(12.275)	(12.908)	(7.925)	(10.342)	(9.454)
8.a. Ekspor	11.451	14.588	10.191	11.841	6.942
8.b. Impor	23.726	27.496	18.116	22.182	16.396
P D R B	57.344	63.875	71.097	80.611	91.275

Tabel 2
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran, Provinsi Sulawesi Utara
(Miliar Rupiah)

Komponen Pengeluaran	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	26.685	28.254	29.930	31.639	33.677
1.a Makanan, Minuman, dan Rokok	11.971	12.325	12.758	13.250	13.790
1.b Pakaian dan Alas Kaki	81	84	92	101	111
1.c Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	2.103	2.301	2.521	2.758	3.014
1.d Kesehatan dan Pendidikan	1.897	2.048	2.151	2.343	2.535
1.e Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	8.605	9.279	10.025	10.616	11.489
1.f Hotel dan Restoran	1.321	1.455	1.584	1.711	1.827
1.g Lainnya	707	762	799	861	912
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1.224	1.332	1.370	1.428	1.431
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	9.289	9.941	10.642	11.538	12.684
3.a. Konsumsi Kolektif	5.615	6.091	6.323	6.719	7.419
3.b. Konsumsi Individu	3.673	3.850	4.319	4.819	5.265
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	21.961	22.370	23.331	23.831	25.996
4.a. Bangunan	20.189	20.055	21.024	21.551	24.036
4.b. Non-Bangunan	1.772	2.314	2.308	2.280	1.960
5. Perubahan Inventori	57	125	48	48	18
6. Ekspor Luar Negeri	9.276	11.820	9.292	12.397	10.946
6.a. Barang	8.855	11.341	8.842	11.998	10.547
6.b. Jasa	421	479	450	399	399
7. Impor Luar Negeri	2.295	2.142	2.222	2.383	2.362
7.a. Barang	1.368	1.169	1.141	1.350	1.088
7.b. Jasa	927	974	1.081	1.033	1.274
8. Net Ekspor Antar Daerah	(11.286)	(13.021)	(9.968)	(12.138)	(11.971)
8.a. Ekspor	9.303	12.735	10.028	10.552	7.197
8.b. Impor	20.590	25.756	19.996	22.690	19.168
P D R B	54.911	58.678	62.422	66.359	70.419

Tabel 3
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran, Provinsi Sulawesi Utara

Komponen Pengeluaran (1)	Tahun				
	2011 (2)	2012 (3)	2013 (4)	2014 (5)	2015 (6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	48,88	48,39	46,11	45,26	45,80
1.a Makanan, Minuman, dan Rokok	22,06	21,48	19,81	19,00	19,07
1.b Pakaian dan Alas Kaki	0,17	0,12	0,12	0,12	0,13
1.c Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	3,81	4,03	3,86	3,96	4,14
1.d Kesehatan dan Pendidikan	3,76	4,01	3,63	3,59	3,55
1.e Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	15,48	15,11	15,22	15,07	15,37
1.f Hotel dan Restoran	2,36	2,37	2,30	2,34	2,40
1.g Lainnya	1,25	1,27	1,17	1,18	1,14
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,19	2,22	2,09	2,07	1,96
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	17,57	17,39	17,37	17,39	17,80
3.a. Konsumsi Kolektif	10,16	10,27	10,54	10,79	11,02
3.b. Konsumsi Individu	7,42	7,12	6,83	6,60	6,78
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	40,20	36,09	34,39	32,38	33,28
4.a. Bangunan	36,87	33,10	31,51	29,75	31,42
4.b. Non-Bangunan	3,33	2,99	2,89	2,64	1,86
5. Perubahan Inventori	0,11	0,21	0,08	0,07	0,02
6. Ekspor Luar Negeri	16,40	19,45	14,74	19,39	14,56
6.a. Barang	15,65	18,65	13,99	18,74	13,92
6.b. Jasa	0,75	0,81	0,75	0,65	0,63
7. Impor Luar Negeri	3,96	3,55	3,64	3,73	3,07
7.a. Barang	2,35	1,90	1,77	1,95	1,21
7.b. Jasa	1,61	1,66	1,87	1,79	1,86
8. Net Ekspor Antar Daerah	(21,41)	(20,21)	(11,15)	(12,83)	(10,36)
8.a. Ekspor	19,97	22,84	14,33	14,69	7,61
8.b. Impor	41,37	43,05	25,48	27,52	17,96
P D R B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel 4
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran, Provinsi Sulawesi Utara

Komponen Pengeluaran (1)	Tahun				
	2011 (2)	2012 (3)	2013 (4)	2014 (5)	2015 (6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,95	5,88	5,93	5,71	6,44
1.a Makanan, Minuman, dan Rokok	2,25	2,96	3,51	3,86	4,08
1.b Pakaian dan Alas Kaki	0,84	3,75	9,35	9,08	9,83
1.c Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	10,12	9,44	9,54	9,39	9,28
1.d Kesehatan dan Pendidikan	6,96	7,96	5,06	8,89	8,23
1.e Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	4,86	7,82	8,05	5,89	8,22
1.f Hotel dan Restoran	11,00	10,14	8,85	8,07	6,75
1.g Lainnya	26,77	7,79	4,87	7,72	5,93
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	6,08	8,90	2,81	4,23	0,25
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	10,29	7,02	7,05	8,42	9,94
3.a Konsumsi Kolektif	15,35	8,47	3,81	6,25	10,42
3.b Konsumsi Individu	3,35	4,79	12,18	11,59	9,27
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	9,04	1,86	4,30	2,14	9,08
4.a Bangunan	12,43	(0,66)	4,83	2,51	11,53
4.b Non-Bangunan	(18,84)	30,60	(0,28)	(1,20)	(14,03)
5. Perubahan Inventori	(135,85)	117,43	(61,32)	(0,28)	(63,28)
6. Ekspor Luar Negeri	71,40	27,42	(21,39)	33,42	(11,70)
6.a Barang	76,15	28,07	(22,04)	35,70	(12,10)
6.b Jasa	9,33	13,66	(6,02)	(11,40)	0,16
7. Impor Luar Negeri	41,18	(6,64)	3,73	7,21	(0,88)
7.a Barang	103,96	(14,56)	(2,38)	18,30	(19,40)
7.b Jasa	(2,92)	5,04	11,07	(4,48)	23,31
8. Net Ekspor Antar Daerah	60,14	15,37	(23,45)	21,77	(1,38)
8.a Ekspor	44,63	36,88	(21,25)	5,22	(31,79)
8.b Impor	52,74	25,09	(22,36)	13,47	(15,52)
P D R B	6,17	6,86	6,38	6,31	6,12

Tabel 5
Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100)
Menurut Pengeluaran, Provinsi Sulawesi Utara

Komponen Pengeluaran (1)	Tahun				
	2011 (2)	2012 (3)	2013 (4)	2014 (5)	2015 (6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	105,05	109,40	109,53	115,32	124,14
1.a Makanan, Minuman, dan Rokok	105,67	111,30	110,41	115,61	126,25
1.b Pakaian dan Alas Kaki	119,67	90,42	90,45	97,29	103,85
1.c Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	103,84	111,93	108,82	115,87	125,33
1.d Kesehatan dan Pendidikan	113,64	125,17	120,01	123,42	127,78
1.e Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	103,17	104,03	107,91	114,42	122,12
1.f Hotel dan Restoran	102,47	104,07	103,23	110,19	120,12
1.g Lainnya	101,09	106,12	104,42	110,57	114,19
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	102,78	106,53	108,69	117,09	125,23
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	108,49	111,77	116,05	121,48	128,11
3.a Konsumsi Kolektif	103,74	107,72	118,53	129,40	135,60
3.b Konsumsi Individu	115,75	118,17	112,42	110,44	117,56
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	104,97	103,06	104,81	109,53	116,86
4.a Bangunan	104,72	105,42	106,55	111,26	119,32
4.b Non-Bangunan	107,85	82,58	88,91	93,19	86,77
5. Perubahan Inventori	108,30	108,39	116,45	116,75	113,02
6. Ekspor Luar Negeri	101,39	105,13	112,81	126,08	121,39
6.a Barang	101,35	105,02	112,52	125,90	120,51
6.b Jasa	102,29	107,78	118,49	131,69	144,58
7. Impor Luar Negeri	98,85	105,97	116,46	126,35	118,80
7.a Barang	98,49	103,76	110,20	116,19	101,93
7.b Jasa	99,39	108,62	123,06	139,64	133,22
8. Net Ekspor Antar Daerah	108,76	99,13	79,50	85,20	78,98
8.a Ekspor	123,08	114,55	101,63	112,22	96,45
8.b Impor	115,23	106,76	90,60	97,76	85,54
P D R B	104,43	108,86	113,90	121,48	129,62

Tabel 6
Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit
Produk Domestik Regional Bruto (2010=100)
Menurut Pengeluaran, Provinsi Sulawesi Utara

Komponen Pengeluaran (1)	Tahun				
	2011 (2)	2012 (3)	2013 (4)	2014 (5)	2015 (6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5,05	4,14	0,12	5,29	7,65
1.a Makanan, Minuman, dan Rokok	5,67	5,33	(0,81)	4,71	9,20
1.b Pakaian dan Alas Kaki	19,67	(24,44)	0,04	7,56	6,75
1.c Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	3,84	7,79	(2,77)	6,48	8,16
1.d Kesehatan dan Pendidikan	13,64	10,15	(4,12)	2,84	3,54
1.e Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	3,17	0,83	3,73	6,03	6,73
1.f Hotel dan Restoran	2,47	1,56	(0,81)	6,74	9,02
1.g Lainnya	1,09	4,98	(1,61)	5,89	3,27
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	2,78	3,65	2,02	7,73	6,95
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8,49	3,02	3,83	4,68	5,46
3.a Konsumsi Kolektif	3,74	3,83	10,03	9,17	4,79
3.b Konsumsi Individu	15,75	2,09	(4,87)	(1,76)	6,44
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,97	(1,82)	1,69	4,51	6,69
4.a Bangunan	4,72	0,67	1,07	4,42	7,24
4.b Non-Bangunan	7,85	(23,43)	7,67	4,82	(6,89)
5. Perubahan Inventori	8,30	0,09	7,43	0,26	(3,19)
6. Ekspor Luar Negeri	1,39	3,69	7,30	11,76	(3,72)
6.a Barang	1,35	3,62	7,14	11,89	(4,28)
6.b Jasa	2,29	5,37	9,94	11,14	9,78
7. Impor Luar Negeri	(1,15)	7,19	9,90	8,50	(5,98)
7.a Barang	(1,51)	5,34	6,21	5,44	(12,28)
7.b Jasa	(0,61)	9,29	13,30	13,47	(4,59)
8. Net Ekspor Antar Daerah	8,76	(8,85)	(19,80)	7,16	(7,30)
8.a Ekspor	23,08	(6,93)	11,28	10,42	(14,05)
8.b Impor	15,23	(7,35)	(15,14)	7,91	(12,51)
P D R B	4,43	4,24	4,63	6,65	6,70

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<http://kota.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SULAWESI UTARA
Jl. 17 Agustus Manado 95119
Telp (0431) 847044, Faks (0431) 862204
Mailbox : sulut@bps.go.id
Website : <http://sulut.bps.go.id>

ISBN : 978-602-1003-61-9



9

786021

003619